



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan
Telepon: (021) 525 3004 (8 saluran) Ext. 212, 222, Faksimile: (021) 525 3159
Laman: www.kemenkum.go.id, Pos-el: birosdm@kemenkum.go.id

Nomor : SEK-KP.03.04-14 7 Januari 2026
Sifat : Segera
Lampiran : Satu berkas
Hal : Seleksi Pengangkatan Pertama Dosen melalui
Mekanisme Perpindahan dari Jabatan Lain di
Lingkungan Kementerian Hukum Tahun 2026

Yth. 1. Pimpinan Tinggi Madya Unit Utama;
2. Kepala Biro dan Pusdatin;
3. Kepala Kantor Wilayah.

di Lingkungan Kementerian Hukum

1. Rujukan:

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6477);
- f. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
- g. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);

- h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 466) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 151);
 - i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1337);
 - j. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 91 Tahun 2017 tentang Perpindahan Dosen dan Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil Nondosen menjadi Dosen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1929);
 - k. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
 - l. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832);
 - m. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 912);
 - n. Peraturan Menteri Hukum Nomor 9 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pengayoman Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 130);
 - o. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 52 Tahun 2025 tentang Profesi, Karier dan Penghasilan Dosen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1121);
 - p. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 494).
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Politeknik Pengayoman Indonesia (POLTEKPIN) Kementerian Hukum telah membentuk 4 (empat) Program Studi Hukum Terapan, yaitu:
 - 1) Program Studi Administrasi Hukum Umum;
 - 2) Program Studi Perancangan Peraturan Perundang-undangan;
 - 3) Program Studi Pembangunan Hukum;
 - 4) Program Studi Hukum Kekayaan Intelektual.
 - b. Kementerian Hukum membuka kesempatan kepada Pegawai yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi Pengangkatan Pertama Dosen melalui Mekanisme Perpindahan dari Jabatan Lain di Lingkungan Kementerian Hukum Tahun 2026 dalam rangka pemenuhan kebutuhan Dosen pada **Program Studi Perancangan Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Kekayaan Intelektual**;

- c. Ketentuan, persyaratan dan tata cara pendaftaran seleksi Pengangkatan Pertama Dosen melalui Mekanisme Perpindahan dari Jabatan Lain sebagaimana terlampir;
 - d. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Biro Sumber Daya Manusia dengan narahubung Sdr. Fajar Sulaeman Taman (Kepala Biro SDM / Hp. 082145957553), Sdr. Andik Prasetyo (Kabag Pengembangan Karir SDM Setjen / Hp. 082232640092) dan / atau Sdri. An Nuur Indonesia Putri (081368073717).
3. Berkaitan dengan hal tersebut, diharapkan Saudara agar dapat memberikan informasi tentang seleksi Pengangkatan Pertama Dosen melalui Mekanisme Perpindahan dari Jabatan Lain di Lingkungan Kementerian Hukum Tahun 2026 pada lingkungan unit kerja masing-masing.

Demikian untuk menjadi periksa.



Sekretaris Jenderal,

A stylized, cursive handwritten signature in black ink, belonging to Nico Afinta.

Nico Afinta

Tembusan:

- 1. Menteri Hukum;
- 2. Wakil Menteri Hukum.

LAMPIRAN

Surat Sekretaris Jenderal

Nomor : SEK-KP.03.04-14

Tanggal : 7 Januari 2026

**SELEKSI PENGANGKATAN PERTAMA DOSEN
MELALUI MEKANISME PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM TAHUN 2026**

A. PERSYARATAN

1. UMUM

- 1) Berstatus Pegawai Negeri Sipil;
- 2) Memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- 3) Sehat jasmani dan rohani;
- 4) Berijazah paling rendah **Magister Hukum untuk Jabatan Asisten Ahli** atau **berijazah Doktor Hukum untuk Jabatan Lektor** (dengan ketentuan pendidikan Strata Satu berasal dari program Sarjana Hukum);
- 5) Nilai Predikat Kinerja paling rendah baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- 6) Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang/berat dan/atau tidak sedang dalam proses pemeriksaan dengan ancaman hukuman disiplin tingkat sedang/berat;
- 7) Tidak sedang menjalankan tugas belajar;
- 8) Tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara;
- 9) Memiliki pangkat paling rendah Penata Muda Tk.I (III/b) untuk Jabatan Asisten Ahli dan pangkat paling rendah Penata (III/c) untuk jabatan Lektor.

2. DOKUMEN PERSYARATAN

- a. Salinan Keputusan pengangkatan PNS;
- b. Salinan Keputusan jabatan terakhir;
- c. Salinan Keputusan pangkat terakhir;
- d. Salinan ijazah pendidikan terakhir yang gelarnya telah tercantum dalam keputusan kepangkatan terakhir, dalam hal belum tercantum wajib ditambahkan lampiran surat persetujuan pencantuman gelar dari Badan Kepegawaian Negara;
- e. Salinan dokumen penilaian kinerja tahun 2024 dan tahun 2025;
- f. Usulan dari Unit Utama atau Kantor Wilayah (ditandatangani paling rendah oleh Pimti Pratama yang membidangi pengelolaan sumber daya manusia);
- g. Surat Keterangan dari pimpinan unit kerja (ditandatangani paling rendah oleh Pimti Pratama yang membidangi pengelolaan sumber daya manusia) yang menyatakan bahwa PNS yang bersangkutan:
 - tidak sedang menjalani/dalam proses pemeriksaan hukuman disiplin sedang atau berat
 - tidak sedang menjalani tugas belajar, dan
 - tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara;
- h. Surat Keterangan Sehat dari Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah yang menyatakan bahwa PNS yang bersangkutan sehat secara jasmani dan rohani;
- i. Surat Pernyataan bersedia ditempatkan dalam jabatan fungsional Dosen dengan jenjang yang telah ditentukan.

B. TAHAPAN

1. Unit Utama atau Kantor Wilayah mengusulkan pegawai di lingkungannya yang berminat dan memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi Pengangkatan Pertama melalui Mekanisme Alih Tugas PNS Non Dosen menjadi PNS Dosen secara kolektif dan **dikirimkan melalui aplikasi SISUMAKER Kementerian Hukum paling lambat kami terima tanggal 21 Januari 2026.**
2. Pegawai yang diusulkan agar memutakhirkan data diri dan menyiapkan berkas-berkas yang diperlukan pada menu Sistem Informasi Administrasi Pegawai (SIAP) dan DOSSIER pada laman **simpeg.kemenkum.go.id**;
3. Pegawai wajib melampirkan dokumen lengkap sesuai dengan persyaratan.

C. JADWAL PELAKSANAAN

NO	TAHAPAN	WAKTU
1.	Pengumuman	07 Januari 2026
2.	Pendaftaran	07 s.d 21 Januari 2026
3.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	Akan diumumkan selanjutnya
4.	Uji Kompetensi	Akan diumumkan selanjutnya
5.	Pengumuman Kelulusan	Akan diumumkan selanjutnya

D. LAIN-LAIN

Kelalaian tidak mengikuti perkembangan informasi menjadi tanggung jawab peserta.



Sekretaris Jenderal,



Nico Afinta